



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA (R E N J A) PERUBAHAN TAHUN 2023



BPKD KABUPATEN PEKALONGAN
Jl. Sindoro No. 7, Kajen

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesehatan dan keadilan di segala bidang. Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 telah selesai disusun,

Penyusunan Renja adalah sebuah amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 21 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4)”.

Renja Perubahan BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada Renstra BPKD 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Pekalongan.

Sejalan dengan kebutuhan akan peningkatan kinerja, maka BPKD Kabupaten Pekalongan telah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, sebagai instrumen penjabaran sekaligus pedoman pada pelaksanaan tugas pokoknya dalam rangka membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Bidang Keuangan.

Demikian, mudah-mudahan Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadikan pedoman dan bermanfaat bagi semua pihak.

Kajen, September 2023

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN




CASMIDI, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650407 199203 1 010

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2 LANDASAN HUKUM..... | 2 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... | 5 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II..... | 7 |
| 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD KABUPATEN PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 | 7 |
| 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPKD | 13 |
| 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPKD | 15 |
| 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN | 17 |
| 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN | 25 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BPKD..... | 30 |
| BAB IV PENUTUP | 35 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2023..... | 8 |
| Tabel 2.4 Reviu Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Pekalongan | 18 |
| Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif BPKD Kabupaten Pekalongan Perubahan Anggaran Tahun 2023..... | 30 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai pengusulan program dan kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju. Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program serta indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

Sedangkan prakiraan maju memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, agar kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan dapat dipastikan.

Rencana Kerja BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun dalam rangka membantu Bupati Pekalongan dalam mewujudkan Visi dan Misi, Visi Bupati Pekalongan Periode 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (SETARA) dan Berbudaya Gotong Royong”***.

Sedangkan Misi yang diemban oleh BPKD Kabupaten Pekalongan adalah mewujudkan Misi yang ke-2 yaitu : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif, maka BPKD Kabupaten Pekalongan berupaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan badan”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai adalah “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah”.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJPD 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan 2021-2026;
- v. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 27); dan
- w. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Perubahan BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan RKA pelaksanaan kegiatan BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 dalam mencapai target kinerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan; dan
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Perubahan BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Perubahan BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Kabupaten Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKD Kabupaten Pekalongan hingga triwulan II tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2023.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKD, berisikan mengenai kajian terhadap capaian kinerja BPKD tahun 2023.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD, berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat pelayanan BPKD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BPKD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKD;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPKD; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan, berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang mengalami perubahan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD KABUPATEN PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.

Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dapat dievaluasi pada laporan kinerja dan laporan realisasi anggaran. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja BPKD Kabupaten Pekalongan tahun berkenaan dan pencapaian Renstra BPKD Kabupaten Pekalongan adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BPKD Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BPKD Kabupaten Pekalongan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu evaluasi Perubahan Renja bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian kinerja BPKD Kabupaten Pekalongan dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat dari capaian reealisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja. Adapun capaian rencana kerja BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II adalah pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2023
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan**

| NO | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TRIWULAN II TA. 2023 | | | TARGET KINERJA (OUTPUT) | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------|--------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 40.947.935.446,00 | 21.769.625.695,00 | 53,16 | 100 | | 47,51 |
| | I PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 5.000.000,00 | 3.410.000,00 | 68,20 | | | |
| | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 3.410.000,00 | 68,20 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 |
| | II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 17.306.485.446,00 | 7.667.130.803,00 | 44,30 | | | |
| | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.998.485.446,00 | 7.518.010.803,00 | 44,23 | 14 Bulan | 8 Bulan | 57,14 |
| | 2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 308.000.000,00 | 149.120.000,00 | 48,42 | 12 Bulan | 6 Bulan | 50,00 |
| | III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 4.456.015,00 | 89,12 | | | |
| | 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 5.000.000,00 | 4.456.015,00 | 89,12 | 1 Orang | 1 Orang | 100,00 |
| | IV Administrasi Umum Perangkat Daerah | 280.000.000,00 | 177.438.124,00 | 63,37 | | | |
| | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | 6.944.800,00 | 69,45 | 12 Bulan | 6 Bulan | 50,00 |
| | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000,00 | 35.802.100,00 | 71,60 | 12 Bulan | 6 Bulan | 50,00 |
| | 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 20.000.000,00 | 9.877.800,00 | 49,39 | 12 Bulan | 6 Bulan | 50,00 |
| | 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 50.000.000,00 | 40.030.100,00 | 80,06 | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 |
| | 5 Fasilitas Kunjungan Tamu | 50.000.000,00 | 20.231.200,00 | 40,46 | 12 Bulan | 6 Bulan | 50,00 |
| | 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.000.000,00 | 64.552.124,00 | 64,55 | 60 Laporan | 30 Laporan | 50,00 |
| | 7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 761.302.000,00 | 75.301.900,00 | 9,89 | | | |
| | 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 500.000.000,00 | 6.319.900,00 | 1,26 | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 |
| | 2 Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 |
| | 3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 261.302.000,00 | 68.982.000,00 | 26,40 | 18 Unit | 5 Unit | 27,78 |

| NO | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | | TRIWULAN II TA. 2023 | | | TARGET KINERJA (OUTPUT) | | |
|----------|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------|
| | | | ANGGARAN | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| | VI | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22.146.450.000,00 | 12.847.552.542,00 | 58,01 | | | |
| | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21.484.450.000,00 | 12.565.685.875,00 | 58,49 | 12 Bulan | 6 Bulan | 50,00 |
| | 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 662.000.000,00 | 281.866.667,00 | 42,58 | 14 Bulan | 6 Bulan | 42,86 |
| | VII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 443.698.000,00 | 994.336.311,00 | 21,26 | | | |
| | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 215.000.000,00 | 72.639.311,00 | 33,79 | 48 Unit | 36 Unit | 75,00 |
| | 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 58.698.000,00 | 21.697.000,00 | 36,96 | 12 Bulan | 6 Bulan | 50,00 |
| | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| B | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | 388.412.640.000,00 | 51.816.821.624,00 | 13,34 | 100 | | 15,82 |
| | I | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 2.005.000.000,00 | 209.066,200,00 | 10,43 | | | |
| | 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |
| | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 200.000.000,00 | 8.276.200,00 | 4,14 | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |
| | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |
| | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 740.000.000,00 | 86.100.000,00 | 11,64 | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |
| | 5 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 340.000.000,00 | 114.690.000,00 | 33,73 | 6 Dokumen | 2 Dokumen | 33,33 |
| | II | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 713.000.000,00 | 282.940.000,00 | 39,68 | | | |
| | 1 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 135.000.000,00 | 22.685.100,00 | 16,80 | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |
| | 2 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 90.000.000,00 | 44.119.650,00 | 49,02 | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TRIWULAN II TA. 2023 | | | TARGET KINERJA (OUTPUT) | | | |
|----|--|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | |
| | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 168.000.000,00 | 112.501.000,00 | 66,96 | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |
| | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 50.000.000,00 | 22.906.000,00 | 45,81 | 2 Kasus | 0 Kasus | 0,00 |
| | 5 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 270.000.000,00 | 80.728.250,00 | 29,90 | 2000 Blangko | 0 Blangko | 0,00 |
| | III | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 1.039.000.000,00 | 278.140.600,00 | 26,77 | | | |
| | 1 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |
| | 2 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 214.000.000,00 | 213.165.400,00 | 99,61 | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00 |
| | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 460.000.000,00 | 64.975.200,00 | 14,13 | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |
| | 4 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 195.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 OPD | 0 OPD | 0,00 |
| | IV | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 384.334.640.000,00 | 51.109.497224,00 | 13,30 | | | |
| | 1 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 365.759.902.000,00 | 49.935.630.044,00 | 13,65 | 272 Desa | 140 Desa | 51,47 |
| | 2 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 6.000.000.000,00 | 1.173.860.000,00 | 19,56 | 1 Tahun | 0 Tahun, 6 Bulan | 50,00 |
| | 3 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | 12.574.738.000,00 | 7.180.000,00 | 0,06 | 272 Desa | 0 Desa | 0,00 |
| | V | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 321.000.000,00 | 146.243.800,00 | 45,56 | | | |
| | 1 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 321.000.000,00 | 146.243.800,00 | 45,56 | 2 Aplikasi | 1 Aplikasi | 50,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TRIWULAN II TA. 2023 | | | TARGET KINERJA (OUTPUT) | | |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|---|---|--------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| C | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 2.800.000.000,00 | 534.131.716,00 | 19,08 | 100 | | 41,66 |
| I | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2.800.000.000,00 | 534.131.716,00 | 19,08 | | | |
| | 1 Penyusunan Standar Harga | 175.000.000,00 | 16.850.000,00 | 7,49 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 |
| | 2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 150.000.000,00 | 10.717.000,00 | 7,14 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 |
| | 3 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 20.000.000,00 | 4.303.000,00 | 21,52 | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |
| | 4 Penatausahaan Barang Milik Daerah | 145.000.000,00 | 62.425.000,00 | 43,05 | 2 Laporan | 0 Laporan | 0,00 |
| | 5 Inventarisasi Barang Milik Daerah | 145.000.000,00 | 4.422.200,00 | 3,05 | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 |
| | 6 Pengamanan Barang Milik Daerah | 1.610.000.000,00 | 292.784.250,00 | 18,19 | 200 sertifikat, 2 dokumen polis asuransi, 75 buah papan mana, 4 unit gedung | 82 sertifikat, 156 pendaftaran sertifikat, 4 unit gedung, | 40,00 |
| | 7 Penilaian Barang Milik Daerah | 75.000.000,00 | 4.525.000,00 | 6,03 | 2 Laporan | 0 Laporan | 0,00 |
| | 8 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 150.000.000,00 | 57.180.966,00 | 38,12 | 2 Laporan | 1 Laporan | 50,00 |
| | 9 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 150.000.000,00 | 28.428.300,00 | 18,95 | 3 Dokumen | 0 Dokumen | 60,00 |
| | 10 Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah | 40.000.000,00 | 22.505.000,00 | 56,26 | 2 Laporan | 1 Laporan | 50,00 |
| | 11 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 60.000.000,00 | 12.674.000,00 | 21,27 | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |
| | 12 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 30.000.000,00 | 17.227.000,00 | 57,42 | 47 OPD | 47 OPD | 100,00 |
| D | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 3.015.021.500,00 | 1.383.941.050,00 | 45,90 | 100 | | 40,00 |
| I | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3.015.021.500,00 | 1.383.941.050,00 | 45,90 | | | |
| | 1 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah | 141.000.000,00 | 43.622.200,00 | 30,94 | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |
| | 2 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 348.920.000,00 | 192.951.750,00 | 55,30 | 285 Desa | 285 Desa | 100,00 |
| | 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 268.021.500,00 | 98.335.000,00 | 36,69 | 1 Aplikasi | 0 Aplikasi | 0,00 |
| | 4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 610.000.000,00 | 269.074300,00 | 44,11 | 1 Aplikasi | 0 Aplikasi | 0,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | | TRIWULAN II TA. 2023 | | | TARGET KINERJA (OUTPUT) | | |
|----|--|---|---------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------|-------|
| | | | ANGGARAN | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| | 5 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 350.000.000,00 | 64.124.500,00 | 18,32 | 3 Aplikasi | 2 Aplikasi | 80,00 |
| | 6 | Penagihan Pajak Daerah | 387.080.000,00 | 190.656.500,00 | 49,26 | 12 Bulan | 6 Bulan | 50,00 |
| | 7 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 910.000.000,00 | 525.176.800,00 | 57,71 | 12 Bulan | 6 Bulan | 50,00 |
| | J U M L A H | | 435.175.596.946,00 | 74.820.759.105,00 | 17,19 | 100 | | 36,24 |

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Berdasarkan dari Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp 435.175.596.946,00 yang bersumber dari dana APBD;
2. Dalam realisasi anggaran hingga triwulan II tahun berjalan, anggaran tersebut terserap senilai Rp 74.820.759.105,00 atau 17, 19% dari pagu anggaran;
3. Capaian kinerja, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran/output yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan yakni sebesar 36,24%;
4. Terdapat deviasi 19,05% antara capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun secara administrasi keuangan belum selesai;
5. Secara umum program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada BPKD Kabupaten Pekalongan telah memenuhi target kinerja dan/atau realisasi keuangan dari yang telah direncanakan;
6. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain:
 - a. Penyusunan rencana kerja yang baik dalam menentukan program/kegiatan sehingga dapat dilaksanakan dan hasilnya sesuai target kinerja keluaran;
 - b. Indikator/sasaran kinerja dipetakan berdasarkan analisis sesuai dengan norma dan standar; dan
 - c. Pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdaya yang ada secara menyeluruh, efektif dan efisien.
7. Terdapat sub kegiatan yang belum terealisasi baik secara anggaran maupun capaian kinerja hingga triwulan II tahun 2023, yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator jumlah unit mobil yang tersedia sebanyak 1 unit, namun capaian masih 1,26 %;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tersedia sebanyak 18 unit, namun capaian realisasi masih 26,40%;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator jumlah bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit) sebanyak 1 unit, namun capaian realisasi masih 0,00%;

- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan indikator jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun sebanyak 2 Dokumen, namun capaian realisasi masih 0,00%;
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan indikator jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang tersusun sebanyak 2 dokumen, namun capaian realisasi masih 0,00%;
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan indikator jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun sebanyak 2 Dokumen, namun capaian realisasi masih 11,64%;
 - g. Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan Sub SPD dengan indikator jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD sebanyak 2 dokumen, namun capaian realisasi masih 16,80%;
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan indikator jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran tersusun sebanyak 1 dokumen, namun capaian realisasi masih 0,00%; dan
 - i. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Pengelola Keuangan OPD dan jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Keuangan Daerah sebanyak 149 Pengelola Keuangan dan 45 OPD, namun capaian realisasi masih 0,00%.
8. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu:
- a. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dilaksanakan apabila proses administrasi belanja hibahnya sudah selesai;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan apabila proses administrasi belanja hibahnya sudah selesai;
 - c. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya akan dilaksanakan pada Triwulan III sesuai dengan Rencana Anggaran Kasnya;
 - d. Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS akan dilaksanakan pada Triwulan III sesuai dengan Rencana Anggaran Kasnya;

- e. Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV sesuai dengan Rencana Anggaran Kasnya;
 - f. Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV sesuai dengan Rencana Anggaran Kasnya;
 - g. Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV sesuai dengan Rencana Anggaran Kasnya
 - h. Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran akan dilaksanakan pada Triwulan III sesuai dengan Rencana Anggaran Kasnya; dan
 - i. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV sesuai dengan Rencana Anggaran Kasnya.
9. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu langkah-langkah yang diambil antara lain mengoptimalkan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun dan melakukan monitoring serta evaluasi internal secara berkala; dan
 10. Perkiraan capaian target kinerja program/kegiatan BPKD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran berjalan yakni tahun 2023 adalah senilai 100,00%.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap, sehingga perlu ditetapkannya isu-isu strategis tahun 2023 berdasarkan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKD Kabupaten Pekalongan adalah:

1. Perubahan regulasi yang cepat sehingga memerlukan waktu dalam penerapan di Kabupaten Pekalongan, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah; dan
2. Sumber daya manusia dan sarana serta prasarana terbatas yang tidak sebanding dengan jumlah dan beban kegiatan, hal ini menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan teknis kegiatan.

Melihat dari permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja BPKD di masa yang akan datang, **peluang** untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

1. Perlunya penambahan Pegawai untuk Petugas Pemungut Pajak Daerah / Retribusi Daerah, petugas appraisal / penaksir PBB-P2, tenaga administrasi maupun operator komputer dan peningkatan SDM melalui Bimbingan Teknik;
2. Perlunya dilaksanakan kegiatan pemutakhiran Data Obyek Pajak dan Wajib Pajak PBB;
3. Dilakukan pemeliharaan pendataan/up date data, sehingga diharapkan data mendekati valid yang berdampak pada hasil perencanaan pendapatan;
4. Perlu perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi serta peraturan pendukung lainnya dalam pengelolaan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi sehingga sesuai dengan kondisi riil yang ada;
5. Melaksanakan Kegiatan Updating SIM Gaji, untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terkait pemberian gaji pada PNS.

Disamping adanya peluang yang dapat dimanfaatkan terdapat berbagai **tantangan** yang perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan, tantangan tersebut antara lain :

1. Kebijakan nasional / peraturan perundang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi penyusunan kebijakan pembangunan di daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah;
3. Belum optimalnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah terhadap penyusunan kebijakan;

4. Belum optimalnya hasil penyusunan kebijakan karena masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
5. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelaksanaan renja hingga triwulan II tahun 2023, maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Segera melakukan penyusunan regulasi turunan sehingga dapat diterapkan di Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan
3. Melakukan pengalokasian sumber daya secara tepat agar dapat bekerja seoptimal mungkin dalam pelaksanaan kegiatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN.

Berdasarkan rancangan Perubahan RKPD tahun 2023, BPKD Kabupaten Pekalongan melakukan analisis kebutuhan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renja tahun 2023.

Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan pagu anggaran yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir secara optimal dalam dokumen Perubahan RKPD baik jumlah program/kegiatan serta sub kegiatan, volume, maupun pagu anggaran yang dibutuhkan.

Setelah membandingkan rancangan akhir Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada Perubahan Renja tahun 2023 beserta pagunya telah terakomodir dalam rancangan awal Perubahan RKPD. Berikut reuiu rancangan perubahan RKPD 2023:

**Tabel 2.4 Reviu Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Pekalongan
Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

| NO | RENCANA TAHUN 2023 | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |
|----------|--|--|---|-------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | | |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 37.573.674.750,00 | | | 43.119.121.000,00 | 5.545.446.250,00 |
| | I | PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | | 5.000.000,00 | | | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 5.000.000,00 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 15.030.674.750,00 | | | 15.040.546.000,00 | 9.871.250,00 |
| | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | 14 Bulan | 14.722.674.750,00 | Jumlah bulan terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | 14 Bulan | 14.732.546.000,00 | 9.871.250,00 |
| | 2 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah bulan terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Bulan | 308.000.000,00 | Jumlah bulan terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Bulan | 308.000.000,00 | 0,00 |
| | III | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.000.000,00 | | | 55.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Orang | 5.000.000,00 | Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Orang | 55.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | IV | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 280.000.000,00 | | | 515.000.000,00 | 235.000.000,00 |
| | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor | 12 Bulan | 10.000.000,00 | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor | 12 Bulan | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 50.000.000,00 | Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 70.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12 Bulan | 20.000.000,00 | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12 Bulan | 35.000.000,00 | 15.000.000,00 |

| NO | RENCANA TAHUN 2023 | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |
|----|--|--|--|-------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | | |
| | 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Cetak Penggandaan Kantor | 12 Bulan | 50.000.000,00 | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Cetak Penggandaan Kantor | 12 Bulan | 50.000.000,00 | 0,00 |
| | 5 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu | 12 Bulan | 50.000.000,00 | Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu | 12 Bulan | 75.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| | 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 Laporan | 100.000.000,00 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 Laporan | 185.000.000,00 | 85.000.000,00 |
| | 7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - | - | 0,00 | Jumlah Paket Penataan Arsip Dinamis Pada OPD | 1 Paket | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 |
| | V | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 761.302.000,00 | | | 793.427.000,00 | 32.125.000,00 |
| | 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Unit | 500.000.000,00 | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Unit | 493.125.000,00 | (6.875.000,00) |
| | 2 | Pengadaan Mebel | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| | 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit) | 18 Unit | 261.302.000,00 | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit) | 18 Unit | 300.302.000,00 | 39.000.000,00 |
| | VI | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 21.048.000.000,00 | | | 26.096.450.000,00 | 5.048.450.000,00 |
| | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 20.386.000.000,00 | Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 25.434.450.000,00 | 5.048.450.000,00 |
| | 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Orang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 9 Orang | 662.000.000,00 | Jumlah Orang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 9 Orang | 662.000.000,00 | 0,00 |
| | VII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 443.698.000,00 | | | 608.698.000,00 | 165.000.000,00 |
| | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | 12 Bulan | 215.000.000,00 | Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | 12 Bulan | 250.000.000,00 | 35.000.000,00 |

| NO | RENCANA TAHUN 2023 | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |
|----------|--|---|---|------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| | | | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| | 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan) | 12 Bulan | 58.698.000,00 | Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan) | 12 Bulan | 123.698.000,00 | 65.000.000,00 |
| | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit) | 1 Unit | 170.000.000,00 | Jumlah Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit) | 1 Unit | 235.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| B | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 387.892.640.000,00 | | | 395.039.099.000,00 | 7.146.459.000,00 |
| | I | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 1.835.000.000,00 | | | 2.045.000.000,00 | 210.000.000,00 |
| | 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun | 2 Dokumen | 225.000.000,00 | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun | 2 Dokumen | 225.000.000,00 | 0,00 |
| | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | 0,00 |
| | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang tersusun | 2 Dokumen | 500.000.000,00 | Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang tersusun | 2 Dokumen | 500.000.000,00 | 0,00 |
| | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun | 2 Dokumen | 740.000.000,00 | Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun | 2 Dokumen | 740.000.000,00 | 0,00 |
| | 5 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Peraturan Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan APBD Tahun 2022 | 6 Dokumen | 170.000.000,00 | Jumlah Peraturan Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan APBD Tahun 2022 | 6 Dokumen | 380.000.000,00 | 21.000.000,00 |

| NO | RENCANA TAHUN 2023 | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |
|----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|--|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| | II | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 643.000.000,00 | | | 701.200.000,00 | 58.200.000,00 |
| | | 1 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD yang diterbitkan | 2 Dokumen dan 350 SPD | 135.000.000,00 | Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD yang diterbitkan | 2 Dokumen dan 350 SPD | 123.200.000,00 | (11.800.000,00) |
| | | 2 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah dokumen perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan | 2 Dokumen | 90.000.000,00 | Jumlah dokumen perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan | 2 Dokumen | 90.000.000,00 | 0,00 |
| | | 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Daftar gaji ASN yang tersusun dan rekonsiliasi PFK yang terlaksana | 4 Laporan dan 2 BA | 168.000.000,00 | Daftar gaji ASN yang tersusun dan rekonsiliasi PFK yang terlaksana | 4 Laporan dan 2 BA | 168.000.000,00 | 0,00 |
| | | 4 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Kasus TP-TGR yang Tertangani | 2 Kasus | 50.000.000,00 | Jumlah Kasus TP-TGR yang Tertangani | 2 Kasus | 50.000.000,00 | 0,00 |
| | | 5 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Belanja APBD Kab. Pekalongan yang terbayar | 2000 Blangko | 200.000.000,00 | Belanja APBD Kab. Pekalongan yang terbayar | 2000 Blangko | 270.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| | III | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 865.000.000,00 | | | 1.069.000.000,00 | 204.000.000,00 |
| | | 1 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran tersusun | 1 Dokumen | 112.000.000,00 | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran tersusun | 1 Dokumen | 170.000.000,00 | 58.000.000,00 |
| | | 2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 3 Dokumen | 158.000.000,00 | Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 3 Dokumen | 214.000.000,00 | 56.000.000,00 |

| NO | RENCANA TAHUN 2023 | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |
|----------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD yang tersusun | 2 Dokumen | 400.000.000,00 | Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD yang tersusun | 2 Dokumen | 460.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| | 4 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelola Keuangan OPD dan jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Keuangan Daerah | 149 Pengelola Keuangan dan 45 OPD | 195.000.000,00 | Jumlah Pengelola Keuangan OPD dan jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Keuangan Daerah | 149 Pengelola Keuangan dan 45 OPD | 225.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | IV | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 384.304.640.000,00 | | | 390.902.899.000,00 | 6.598.259.000,00 |
| | 1 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah desa yang menerima dana desa dan Alokasi Dana Desa | 272 Desa | 365.729.902.000,00 | Jumlah desa yang menerima dana desa dan Alokasi Dana Desa | 272 Desa | 372.028.161.000,00 | 7.298.259.000,00 |
| | 2 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah tahun tersalurkannya dana untuk keperluan mendesak dan tidak diprediksi | 1 Tahun | 6.000.000.000,00 | Jumlah tahun tersalurkannya dana untuk keperluan mendesak dan tidak diprediksi | 1 Tahun | 5.300.000.000,00 | (700.000.000,00) |
| | 3 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah tersalurkannya dana bagi hasil kabupaten/kota | 272 Desa | 12.574.738.000,00 | Jumlah tersalurkannya dana bagi hasil kabupaten/kota | 272 Desa | 12.574.738.000,00 | 0,00 |
| | V | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | 245.000.000,00 | | | 321.000.000,00 | 76.000.000,00 |
| | 1 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Sistem Aplikasi Informasi Pemerintah Daerah yang terpelihara | 2 Aplikasi | 245.000.000,00 | Jumlah Sistem Aplikasi Informasi Pemerintah Daerah yang terpelihara | 2 Aplikasi | 321.000.000,00 | 76.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| C | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | 2.025.000.000,00 | | | 3.200.000.000,00 | 1.175.000.000,00 |
| | I | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 2.025.000.000,00 | | | 3.200.000.000,00 | 1.175.000.000,00 |

| NO | RENCANA TAHUN 2023 | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------|
| | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| | 1 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah dokumen Perbup standar satuan harga yang tersusun | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | Jumlah dokumen Perbup standar satuan harga yang tersusun | 1 Dokumen | 225.000.000,00 | 100.000.00 0,00 |
| | 2 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | - | - | 150.000.000,00 | Jumlah Sistem Aplikasi RKBMD | 1 Aplikasi | 150.000.000,00 | 182.500.000,00 |
| | 3 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Jumlah dokumen Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 |
| | 4 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Updating Sistem Aplikasi SIMPERS dan SIMASET | 2 Aplikasi | 145.000.000,00 | Jumlah Updating Sistem Aplikasi SIMPERS dan SIMASET | 2 Aplikasi | 145.000.000,00 | 0,00 |
| | 5 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | 145.000.000,00 | | | 145.000.000,00 | 0,00 |
| | 6 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah papan nama identitas kepemilikan aset tanah Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang terpasang | 2 Dokumen, 4 Pemeliharaan gedung, 200 Pendaftaran Sertifikat | 935.000.000,00 | Jumlah papan nama identitas kepemilikan aset tanah Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang terpasang | 2 Dokumen, 4 Pemeliharaan gedung, 200 Pendaftaran Sertifikat | 1.910.000.000,00 | 975.000.000,00 |
| | 7 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen hasil penilaian BMD yang tersedia | 3 Dokumen | 75.000.000,00 | Jumlah dokumen hasil penilaian BMD yang tersedia | 3 Dokumen | 175.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | 8 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen SK Status Penggunaan BMD yang tersusun | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Jumlah dokumen SK Status Penggunaan BMD yang tersusun | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 |
| | 9 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen administrasi Penggunaan, pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, penjualan, hibah, pemusnahan dan penghapusan | 14 Dokumen sewa, 2 Dokumen hibah, 1 Dokumen pemusnahan, 4 Dokumen SK Penghapusan, 2 Dokumen Penjualan | 150.000.000,00 | Jumlah dokumen administrasi Penggunaan, pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, penjualan, hibah, pemusnahan dan penghapusan | 14 Dokumen sewa, 2 Dokumen hibah, 1 Dokumen pemusnahan, 4 Dokumen SK Penghapusan, 2 Dokumen Penjualan | 150.000.000,00 | 0,00 |
| | 10 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | 40.000.000,00 | | | 40.000.000,00 | 0,00 |

| NO | RENCANA TAHUN 2023 | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |
|--------------------|--|--|---|------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| | 11 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah dokumen Perbup standar satuan harga yang tersusun | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | Jumlah dokumen Perbup standar satuan harga yang tersusun | 1 Dokumen | 225.000.000,00 | 100.000.00 0,00 |
| | 12 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengurus dan Penyimpan Barang yang terlatih | 47 OPD | 30.000.000,00 | Jumlah Pengurus dan Penyimpan Barang yang terlatih | 47 OPD | 30.000.000,00 | 0.00 |
| D | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 2.759.021.500,00 | | | 3.312.821.500,00 | 553.800.000,00 |
| I | Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 2.759.021.500,00 | | | 3.312.821.500,00 | 553.800.000,00 |
| | 1 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 141.000.000,00 | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 141.000.000,00 | 0,00 |
| | 2 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 285 Desa/Kelurahan | 210.000.000,00 | Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 285 Desa/Kelurahan | 496.720.000,00 | 286.720.000,00 |
| | 2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya tenaga administrasi dan penunjang pelayanan PBB | 12 Bulan | 268.021.500,00 | Jumlah bulan terpenuhinya tenaga administrasi dan penunjang pelayanan | 12 Bulan | 293.021.500,00 | 25.000.000,00 |
| | 3 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Kartu Obyek Pajak Daerah | 22.175 Objek Pajak | 560.000.000,00 | Jumlah Kartu Obyek Pajak Daerah | 22.175 Objek Pajak | 585.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| | 4 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah aplikasi data base pajak daerah terupdate | 3 Aplikasi | 350.000.000,00 | Jumlah aplikasi data base pajak daerah terupdate | 3 Aplikasi | 350.000.000,00 | 0,00 |
| | 5 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Bulan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 12 Bulan | 320.000.000,00 | Jumlah Bulan Pelaksanaan | 12 Bulan | 537.080.000,00 | 217.080.000,00 |
| | 6 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah bulan Koordinasi dan Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah yang terlaksana | 12 Bulan | 910.000.000,00 | Jumlah bulan Koordinasi dan Rekonsiliasi penerimaan | 12 Bulan | 910.000.000,00 | 0,00 |
| J U M L A H | | | | | 430.250.336.250,00 | | | 444.671.041.500,00 | 14.420.705.250,00 |

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

Berdasarkan tabel 2.4 Reviu Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Pekalongan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa sub kegiatan yang memerlukan penambahan anggaran maupun pergeseran anggaran karena beberapa alasan dan dengan memperhatikan prioritas serta kemampuan daerah dalam pendanaan, maka berikut uraian hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 berdasarkan tabel di atas:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, guna menunjang kinerja di BPKD Kabupaten Pekalongan maka dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang penyusunan dokumen perencanaan. Sebelum penyusunan dokumen RKA dan DPA tahun anggaran 2024, perlu adanya penyusunan dokumen laporan penilaian risiko tahun 2024. Oleh karena itu dibutuhkan tambahan pagu senilai Rp 5.000.000,00 sehingga pagunya menjadi Rp 10.000.000,00
2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, adanya insentif pemungutan pajak daerah tribulan IV tahun 2022 yang belum dianggarkan pada anggaran penetapan tahun 2023. Oleh karena itu dibutuhkan tambahan pagu senilai Rp 9.871.250,00 sehingga pagunya menjadi Rp 14.732.546.000,00
3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, guna meningkatkan kompetensi petugas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu mengikutsertakan petugas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Drone. Oleh karena itu dibutuhkan tambahan pagu senilai Rp 50.000.000,00 sehingga pagunya menjadi Rp 55.000.000,00
4. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, guna menunjang kinerja di BPKD Kabupaten Pekalongan maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan penerangan yang memadai dengan pagu anggaran sebelumnya senilai Rp10.000.000,00 belum cukup mengakomodir kebutuhan penerangan yang dibutuhkan di BPKD maka oleh karenanya dibutuhkan tambahan pagu senilai Rp5.000.000,00 sehingga pagunya menjadi senilai Rp15.000.000,00;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, guna menunjang kinerja di BPKD Kabupaten Pekalongan maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dengan pagu anggaran sebelumnya senilai Rp 50.000.000,00 belum cukup mengakomodir kebutuhan atk, kertas dan bahan cetak yang dibutuhkan di BPKD maka oleh karenanya dibutuhkan tambahan pagu senilai Rp 20.000.000,00 sehingga pagunya menjadi senilai Rp 70.000.000,00;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, guna memelihara dan menjaga kenyamanan di BPKD Kabupaten Pekalongan yang mana merupakan unit kerja yang

terdapat pelayanan masyarakat maka kondisi lingkungan BPKD merupakan hal yang wajib diberi perhatian lebih. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukan penunjang kegiatan agar mengakomodir kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga yang memadai dengan pagu anggaran sebelumnya senilai Rp 20.000.000,00 belum cukup mengakomodir kebutuhan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan sehingga dibutuhkan tambahan pagu senilai Rp 15.000.000,00 sehingga pagunya menjadi Rp 35.000.000,00;

7. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dalam rangka meningkatkan kinerja Badan dan dalam rangka monitoring serta evaluasi baik kinerja maupun pendapatan maka dibutuhkan rapat monitoring dan evaluasi secara intensif namun pagu yang tersedia belum dapat mengakomodir sehingga dibutuhkan tambahan pagu senilai Rp25.000.000,00 atau pagu menjadi senilai Rp70.000.000,00;
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka menunjang kegiatan maka dibutuhkan pendanaan untuk menunjang dalam rangka perjalanan dinas. Namun pagu yang tersedia masih jauh dari perkiraan perhitungan kebutuhan perjalanan dinas sehingga dibutuhkan tambahan pagu anggaran senilai Rp 85.000.000,00 atau menjadi Rp 185.000.000,00;
9. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, pada anggaran penetapan tahun anggaran 2023 tidak terdapat pagu namun mengingat pentingnya penyimpanan yang memadai dokumen-dokumen keuangan maupun data pendapatan yang belum habis masa retensinya di BPKD Kabupaten Pekalongan, maka dibutuhkan jasa penataan arsip yang mumpuni oleh karenanya dianggarkan pagu untuk penataan arsip senilai Rp 85.000.000,00;
10. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, terdapat efisiensi senilai Rp 6.875.000,00 pada rekening perjalanan dinas biasa. Tidak dicairkan seluruhnya dikarenakan untuk pengadaan mobil hanya membutuhkan sebanyak 4 kali biaya perjalanan dinas survey kendaraan ke dealer mobil.
11. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dibutuhkan tambahan pagu senilai Rp 39.000.000,00 yang digeserkan pagu dari sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dan tambahan pagu mengingat kebutuhan sarana dan prasarana perlu ditambah lagi terutama printer dotmatrik untuk cetak kertas gaji dan scanner;
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berdasarkan perhitungan biaya listrik, air, telfon dan internet pada bulan-bulan sebelumnya terdapat kebutuhan yang belum terakomodir serta terdapat beberapa titik pemasangan PJU baru yang pembayarannya ada di BPKD maka dibutuhkan tambahan pagu senilai Rp 5.048.450.000,00;

13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat penambahan pagu senilai Rp 35.000.000,00 hal ini karena terdapat beberapa kendaraan dengan usia kendaraan yang sudah tua dan kapasitas pemakaiannya tinggi, sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi pula.
14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, mengingat kemampuan APBD yang sedang difokuskan untuk pemulihan ekonomi global maka menyebabkan tidak memungkinkannya menambah pengadaan peralatan secara masiv namun kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan, sehingga alternatif yang disiasati untuk terus meningkatkan kinerja dengan sumber daya yang ada maka dibutuhkan tambahan alokasi dana untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya senilai Rp 65.000.000,00 sehingga menjadi Rp 123.698.000,00;
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk menunjang sarana dan prasarana yang ada maka dibutuhkan tambahan pagu senilai Rp 65.000.000,00 untuk pemeliharaan ruang rapat yang ada di BPKD Kabupaten Pekalongan;
16. 16. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah terdapat penambahan pagu sebesar Rp 210.000.000,00
17. Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD terdapat pengurangan pagu sebesar Rp 11.800.000,00 yang digeser ke sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk pengadaan printer.
18. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait terdapat penambahan pagu sebesar Rp 70.000.000,00 untuk jasa updating simkeuda perbendaharaan.
19. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, sehubungan dengan perlunya tambahan cetak Draft I dan Penjabaran Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 (Enam) bulan berikutnya maka perlu tambahan pagu anggaran senilai Rp58.000.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi Rp170.000.000,00.
20. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehubungan dengan perlunya tambahan cetak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unreview, Unaudited dan Realisasi Penjabaran APBD maka perlu tambahan Pagu Anggaran senilai Rp56.000.000,00 sehingga Pagu Anggaran menjadi Rp 214.000.000,00.
21. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, sehubungan dengan perlunya tambahan cetak Draft I Peraturan

- Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Draft I Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota maka perlu tambahan Pagu Anggaran senilai Rp60.000.000,00 sehingga Pagu Anggaran menjadi Rp460.000.000,00.
22. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota, sehubungan dengan pentingnya persiapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan tambahan pendampingan penatausahaan keuangan kepada SKPD di Kabupaten Pekalongan maka perlu tambahan Pagu Anggaran senilai Rp12.408.500,00. Selain itu pada sub kegiatan ini dibutuhkan tambahan seminar kit dan makan minum untuk peserta bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah maka perlu tambahan Pagu Anggaran senilai Rp17.591.500,00.
 23. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan terdapat penambahan pagu sebesar Rp 7.298.259.000,00; untuk Dana Desa di beberapa desa di Kabupaten Pekalongan.
 24. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak terdapat pengurangan pagu sebesar Rp 700.000.000,00 yang digeser untuk pemenuhan belanja pegawai yang masih membutuhkan tambahan anggaran.
 25. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah, sehubungan dengan perlunya modul baru terkait dengan rekonsiliasi dan integrasi belanja modal dengan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan aset daerah, persediaan dengan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan persediaan, belanja Puskesmas dengan aplikasi E-BLUD yang digunakan untuk pengelolaan keuangan Puskesmas, perlu adanya hak akses baru untuk BPK RI, sehingga ketika ada permintaan data ataupun prosedur baru terkait dengan penyusunan laporan keuangan dapat disajikan dengan cepat dan perlu adanya hak akses baru untuk Inspektorat, sehingga ketika ada permintaan data ataupun prosedur baru dari inspektorat dapat disajikan dengan cepat. Oleh karena itu perlu tambahan Pagu Anggaran senilai Rp76.000.000,00 sehingga Pagu Anggaran menjadi Rp321.000.000,00.
 26. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga terdapat penambahan pagu sebesar Rp 100.000.000,00 untuk belanja jasa penilai / appraisal kajian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Pekalongan tahun 2023.
 27. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp 975.000.000,00, dengan adanya MCP KPK terkait pengamanan aset, maka perlu dilakukan percepatan pensertifikatan tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
 28. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, merupakan sub kegiatan yang menangani mengenai penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan

dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan. Adapun penilaian dapat dilakukan oleh penilai pemerintah maupun penilai public yang ditetapkan oleh pengelola barang yang mana bertujuan untuk mendapatkan informasi nilai wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam tahun berjalan terdapat penambahan pagu sebesar Rp 100.000.000,00 untuk penilaian harga tanah di desa Larikan kecamatan Doro yang akan dijadikan sebagai tempat untuk Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) di Kabupaten Pekalongan.

29. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dilakukan usaha-usaha untuk mencapainya, salah satunya adanya kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat/ wajib pajak tentang perpajakan adapun untuk mendukung kegiatan ini dibutuhkan tambahan pendanaan senilai Rp 286.720.000,00 yang akan digunakan untuk mencetak selebaran sebagai media informasi perpajakan dan untuk honorarium narasumber bimtek terkait kebijakan pajak daerah;
30. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, untuk mendukung upaya peningkatan rasio pendapatan PAD terhadap APBD Kabupaten Pekalongan maka dibutuhkan sarana serta prasarana yang memadai oleh karenanya dibutuhkan tambahan pagu senilai Rp 25.000.000,00;
31. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, untuk mendukung upaya peningkatan rasio pendapatan PAD terhadap APBD Kabupaten Pekalongan maka dibutuhkan sarana serta prasarana yang memadai oleh karenanya dibutuhkan tambahan pagu senilai Rp 25.000.000,00
32. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PAD di Kabupaten Pekalongan, perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak, sehingga dibutuhkan tambahan pendanaan senilai Rp 217.080.000,00 untuk menunjang operasional pekerjaan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 merupakan dokumen perubahan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023.

Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel 3.1, sebagai berikut ;

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
Perubahan Anggaran Tahun 2023

| Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keuangan | Pagu Indikatif | Sumber Dana |
|------|----|----|------|----|--|-----------------|--------------|
| 5 | | | | | Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan | | |
| 5 | 02 | | | | Keuangan | 444.671.041.500 | |
| 5 | 02 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 43.119.121.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10,000,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 15.040.546.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.732.546,000 | PAD, DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 308,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 55,000,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 55,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 515,000,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 70,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 35,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 50,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 75,000,000 | DTU-DAU |

| | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|------------------------|--------------|
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 185,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 85,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 793.427,000,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 493.125.000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 300,302,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26.096.450.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25,434.450,000 | PAD, DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 662,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 608,698,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 250,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 123.698,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 235,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 395.039.099.000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 2,045,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 200,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 225,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 500,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 740,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 380,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 701,200,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 123,200,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 90,000,000 | DTU-DAU |

| | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|------------------------|--------------|
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 168,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 50,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 270,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 1,069,000,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 170,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 214,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 460,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 225,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 390,902,899,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 373,028,161,000 | PAD, DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 5,300,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 12,574.738.000 | PAD |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 321,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 | 02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan | 321,000,000 | DTU-DAU |

| | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|----------------------|--------------|
| | | | | | Daerah | | |
| 5 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 3,200,000,000 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 3,200,000,000 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | 225,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 150,000,000 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 20,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 145,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 145,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1.910,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | 175,000,000 | PAD, DTU-DAU |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 150,000,000 | PAD, DTU-DAU |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 150,000,000 | PAD, DTU-DAU |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 40,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 60,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 30,000,000 | DTU-DAU |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 3,312.821.500 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3,312.821.500 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 141,000,000 | PAD, DTU-DAU |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 496.720,000 | PAD, DTU-DAU |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 293.021.500 | PAD, DTU-DAU |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 585.000.000 | PAD, DTU-DAU |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 350,000,000 | PAD, DTU-DAU |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 11 | Penagihan Pajak Daerah | 537.080,000 | PAD, DTU-DAU |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 910,000,000 | PAD, DTU-DAU |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 dan RKPD Perubahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

Substansi Renja BPKD Kabupaten Pekalongan disusun sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, yaitu memuat kebijakan, program, kegiatan dan lokasi kegiatan dalam pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Perubahan BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 disusun terukur dengan berpedoman pada arah kebijakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dan Renstra BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026;
2. Tindak lanjut alokasi anggaran BPKD Kabupaten Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan;
3. Unsur teknis pelaksana kerja pada BPKD Kabupaten Pekalongan, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan;
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan BPKD Kabupaten Pekalongan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BPKD Kabupaten Pekalongan.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 selain dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai juga diperlukan kompetensi, semangat, tekad dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Perubahan BPKD Kabupaten Pekalongan juga memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan, sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Semoga tersusunnya Renja Perubahan BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 serta memberikan manfaat bagi proses pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



Casmidi

CASMIDI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650407 199203 1 010